

Ethical meaning and academic responsibility in Generative Artificial Intelligence policy in higher education

Makna etis dan tanggung jawab akademik dalam kebijakan pemanfaatan Generative Artificial Intelligence di perguruan tinggi

Fransiskus Xaverius Sabu¹, Taufik Asmiyanto²

^{1,2}Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

^{1,2}Jalan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Kampus UI, Depok 16424

Article Info

Corresponding Author:

Fransiskus Xaverius Sabu

✉ fancysabu86@gmail.com

History:

Submitted: 02-06-2025

Revised: 05-03-2026

Accepted: 16-03-2026

Keyword:

AI policy; technological ethics; hermeneutic phenomenology; critical awareness; higher education.

Kata Kunci :

Kebijakan AI; etika teknologi; hermeneutika fenomenologi; kesadaran kritis; pendidikan tinggi

Abstract

Introduction. This study interprets policy texts on Generative AI in higher education through an ethical and existential lens, using a hermeneutic-phenomenological approach to explore how they cultivate critical awareness and ethical responsibility in AI use for learning.

Research Methods. The research uses Paul Ricoeur's hermeneutic phenomenological approach to analyze GenAI policy texts in higher education, revealing how the constructs that shape ethically oriented AI discourse.

Data Analysis. The data analyzed consist of policy texts on the use of GenAI in higher education. The analyses were conducted through thematic coding to identify the main topics, followed by hermeneutic interpretation to reveal the deeper meaning constructed by the texts within the context of ethics and education.

Result. The analysis revealed four key findings: the interpretation of GenAI as a learning aid, the emphasis on ethics and academic integrity, the tension between regulation and institutional autonomy, and the transformation of the lecturer-student relationship. Collectively, these findings indicate that GenAI policies cultivate a new awareness of the ethical use of technology within higher education institutions.

Conclusion. The GenAI policy is not merely a technical guide but a discourse that shapes the academic community's ethical awareness, fostering a critical and responsible use through a hermeneutic-phenomenological lens.

Abstrak

Pendahuluan. Penelitian ini membahas bagaimana teks kebijakan penggunaan GenAI di perguruan tinggi dimaknai secara etis dan eksistensial. Studi ini bertujuan menafsirkan makna yang dikonstruksikan teks dalam membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab etis penggunaan AI dalam pembelajaran.

Metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika fenomenologi Paul Ricoeur. Metode ini digunakan untuk menganalisis teks kebijakan penggunaan GenAI pada pembelajaran di perguruan tinggi guna menemukan makna yang dikonstruksikan oleh teks tersebut dalam membangun wacana penggunaan teknologi AI yang mengutamakan etika.

Data analisis. Data yang dianalisis berupa teks kebijakan penggunaan GenAI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Analisis dilakukan melalui coding tematik untuk mengidentifikasi topik-topik utama, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi hermeneutik guna mengungkap makna mendalam yang dikonstruksikan oleh teks dalam konteks etika dan pendidikan.

Hasil. Analisis menghasilkan empat temuan utama: pemaknaan GenAI sebagai alat bantu pembelajaran, penegasan etika dan integritas akademik, ketegangan antara regulasi dan otonomi institusi akademik, dan transformasi relasi dosen dan mahasiswa. Keempatnya menunjukkan bahwa kebijakan GenAI membentuk kesadaran baru terhadap penggunaan teknologi secara etis di perguruan tinggi.

Kesimpulan. Kebijakan penggunaan GenAI bukan sekadar panduan teknis, melainkan juga teks yang membentuk kesadaran etis sivitas akademika. Melalui pendekatan hermeneutika fenomenologi, kebijakan dipahami sebagai wacana yang mendorong tanggung jawab eksistensial dalam penggunaan AI secara kritis, reflektif dan bermakna dalam pendidikan tinggi.



Copyright © 2025 by
Berkala Ilmu Perpustakaan
dan Informasi

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the UGM Library and Archives.

 <https://doi.org/10.22146/bip.v22i1.22005>

A. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan hasil dari pergulatan akal budi manusia untuk mengatasi kompleksitas realitas dunia, yang kini menjadi motor utama perubahan dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Kemampuan AI dalam mengumpulkan, mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, dan membuat keputusan, telah membawa manusia pada kebaruan, baik dalam cara berada, berpikir, maupun bertindak. Pada abad informasi ini, AI bahkan membawa kita pada revolusi cara menciptakan, mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi. Adopsi teknologi AI dalam ruang lingkup pendidikan tinggi telah menghasilkan dampak yang sangat signifikan, terutama pada peningkatan efisiensi, personalisasi pembelajaran, dan efektivitas administrasi (Jafar et al., 2024). Selain itu, integrasi teknologi AI ke dalam tata kelola pendidikan tinggi membawa pengalaman baru yaitu dengan kemampuannya dalam memahami kebutuhan individu mahasiswa, melakukan otomatisasi penilaian, dan menghasilkan konten pembelajaran (Munandar et al., 2023).

Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, penggunaan Generatif AI seperti ChatGPT, Deepseek, dan Gemini turut mengakselerasi adopsi teknologi AI ke dalam perguruan tinggi (O'Dea, 2024), yang bahkan telah mengubah perangkat pendidikan digital menjadi agen aktif yang responsif (Liang & Bai, 2024). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *Digital Education Council*, yaitu sebuah aliansi global universitas dan perwakilan industri yang berfokus pada inovasi pendidikan, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa (86 %) menggunakan AI dalam studi mereka. Integrasi teknologi ini mendorong transformasi pengajaran, memperkaya ekosistem penelitian, dan meningkatkan perolehan serta retensi pengetahuan (Malik et al., 2024). Namun, perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia sebagai subjek di tengah dominasi teknologi, bahkan memunculkan kecemasan eksistensial

terhadap potensi destruktif AI yang berpotensi menggeser peran manusia dalam tata kehidupan global (Harari, 2024).

Implementasi teknologi AI di perguruan tinggi memunculkan refleksi kritis pada ranah etis-filosofis maupun praktis. Secara filosofis, penggunaan AI menuntut pertanggungjawaban etis terkait moralitas, keadilan, kesetaraan, transparansi, privasi, dan akuntabilitas (Azevedo et al., 2024). Ketiadaan kebijakan AI menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran akademik, keamanan data, bias algoritma, dan penyebaran informasi palsu (Luo, 2024). Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa dampak negatif AI membentuk pola problematik yang saling berkaitan, seperti potensi manipulasi perilaku dan perluasan pengawasan terhadap mahasiswa yang memunculkan persoalan otonomi dan privasi (Ivanov, 2023). Penggunaan AI yang intens dalam pembelajaran dikaitkan dengan melemahnya kemandirian akademik serta ancaman terhadap orisinalitas karya mahasiswa (Cicchetti, 2024; Luo, 2024)

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, diskursus mengenai adopsi AI diiringi oleh kekhawatiran terhadap potensi disrupsi peran pedagogis dosen. Studi oleh Subiyantoro et al., (2023), menunjukkan bahwa dosen bahasa Inggris memperlihatkan sikap yang ambivalen: di satu sisi mereka tertarik untuk menggunakan AI dalam proses pengajaran, namun di sisi lain timbul kecemasan mengenai kemungkinan tereduksinya peran mereka di masa depan. Temuan tersebut diperkuat oleh Jaelani et al., (2024) yang mengidentifikasi adanya pengaruh AI yang signifikan terhadap perubahan kurikulum dan prestasi akademik mahasiswa. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menggambarkan bahwa disrupsi teknologi AI bagaikan pisau bermata dua. AI menawarkan sejumlah peluang dan manfaat yang menguntungkan, namun di sisi lain, teknologi tersebut memiliki potensi destruktif jika tidak digunakan secara bertanggung jawab.

Keseimbangan antara tanggung jawab etis dan keterbukaan terhadap penggunaan teknologi AI dapat diperkuat dengan adanya

adanya kebijakan yang bersifat holistik. Dalam arti yang lebih luas, kebijakan tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang memiliki makna imperatif, tetapi merupakan wacana yang membentuk makna tertentu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pengalaman dan pemahaman manusia terhadap realitas. Sebagai panduan praktis, kebijakan berfungsi dalam menetapkan norma, standar, dan arah suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, sebagai panduan etika, kebijakan menetapkan nilai-nilai dan norma, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai moral. Dokumen kebijakan informasi mengenai pemanfaatan teknologi AI dipandang sebagai penyangga ekuilibrium dalam mengarahkan penggunaan inovasi teknologi yang tetap menghargai orisinalitas dan berpegang pada nilai-nilai etika secara bertanggung jawab (Malik et al., 2024; Gupta & Nyamapfene, 2025)

Penelitian mengenai pentingnya kebijakan penggunaan AI di perguruan tinggi masih sangat terbatas. Azevedo et al., (2024) dalam penelitiannya mendeskripsikan adanya perbedaan signifikan dalam penggunaan AI di tiga universitas, di mana setiap perguruan tinggi menerapkan kebijakan penggunaan AI secara mandiri berdasarkan situasi kontekstual pada masing-masing perguruan tinggi. Kurangnya kebijakan yang berlaku secara universal menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pemahaman, akses, dan penerapan AI di kalangan dosen. Akibatnya, para dosen menjadi kelompok yang paling terdampak dari situasi transisi ini, di mana mereka dituntut untuk segera beradaptasi tanpa didukung dengan pedoman atau kebijakan yang jelas mengenai pemanfaatan teknologi AI.

Studi yang dilakukan oleh Fatmadiwi & Hartoyo, (2025) memperlihatkan realitas faktual yakni belum adanya formulasi regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang penggunaan AI dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi telah menetapkan kebijakan internal, seperti pedoman etika dan pencegahan plagiarisme. Kajian tersebut juga

mengidentifikasi tantangan kesiapan sumber daya, baik dalam hal infrastruktur maupun kecakapan literasi digital, terutama di kalangan para pendidik. Studi ini menganjurkan rekomendasi mengenai pentingnya kebijakan pemanfaatan teknologi AI untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab etis dalam pemanfaatannya.

Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan karena studi terdahulu belum mengkaji secara mendalam peran kebijakan AI dalam membangun kesadaran pengguna untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara kritis dan bertanggung jawab. Penelitian ini memandang kebijakan tidak hanya sebagai perangkat regulatif, tetapi juga wacana yang memproduksi makna. Melalui pendekatan hermeneutika fenomenologi Paul Ricoeur, penelitian ini menafsirkan dokumen Panduan Pemanfaatan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek untuk memahami makna, prinsip etika, dan tanggung jawab akademik yang terkandung di dalamnya, serta menelaah kontribusinya dalam membangun wacana pemanfaatan AI yang kritis dan bertanggung jawab.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kebijakan Pemanfaatan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Menurut James Anderson, kebijakan adalah kajian tentang suatu permasalahan dan arah tindakan yang dilakukan oleh aktor dan sekelompok aktor untuk suatu tujuan tertentu (Bagirzade, 2024). Berbeda dengan hukum atau aturan yang menerapkan aspek larangan yang bersifat koersif, kebijakan lebih berfokus pada aspek arahan atau petunjuk untuk meraih sesuatu yang diperlukan. Bertolak dari definisi tersebut, kebijakan dapat dijelaskan secara lebih sederhana yakni sebagai sistem prinsip-prinsip yang disusun untuk pengambilan keputusan guna mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam tata kelola institusi pendidikan, peningkatan prestasi siswa, maupun dalam hal meningkatkan persaingan pada pasar

global (White et al., 2020). Perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebijakan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kemajuan, yang pada gilirannya mesti mempersiapkan seluruh sumber daya pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, inklusif, dan selaras zaman (Fatmadiwi & Hartoyo, 2025).

Sebagai respon terhadap fenomena penggunaan AI di perguruan tinggi yang semakin masif, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Buku Panduan Penggunaan Generatif AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi pada Oktober 2024. Penerbitan dokumen tersebut dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menetapkan koridor etis penggunaan AI pada pembelajaran di perguruan tinggi demi menjaga integritas akademik sambil tetap terbuka pada adaptasi teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

b. Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur

Paul Ricoeur adalah seorang filsuf Prancis yang sangat terkenal karena pemikiran filsafatnya yang menekankan hermeneutika, yakni penafsiran atau interpretasi tekstual yang berfokus pada bahasa, refleksi, pemahaman, dan konsep diri (Simoný et al., 2018). Ricoeur menggabungkan fenomenologi ke dalam pemikiran filsafatnya dan menggagas sebuah cara baru dalam memahami pengalaman melalui interpretasi kritis. Sebetulnya, hermeneutika fenomenologi berakar dari pemikiran Heidegger yang melihat kelemahan fenomenologi Husserl dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap pengalaman eksistensial. Heidegger berargumen bahwa pemahaman terhadap dunia kehidupan dapat dibangun melalui investigasi dan penafsiran terhadap kisah dan pengalaman, di mana di dalamnya terjadi peleburan pemahaman antara subjek penafsir dan situasi kontekstual di hadapannya (Watson, 2021).

Hermeneutika dan fenomenologi, dalam pemikiran Ricoeur, beririsan secara dialektis dan saling mengandaikan (Mezei, 2022).

Hermeneutika berakar pada prasangka fenomenologis, sementara fenomenologi sendiri tidak dapat terbentuk tanpa praduga hermeneutis. Ricoeur mengkritik fenomenologi Husserl yang dianggap terlalu idealistik karena memisahkan diri dari proyek hermeneutika. Fenomenologi Husserl menempatkan pengalaman sebagai arena kebenaran pertama, dengan subjektivitas sebagai sumber intuisi. Akibatnya, hanya yang imanen yang dianggap pasti, sedangkan yang transenden dipandang meragukan. Idealisme ini akhirnya memposisikan subjek pengalaman sebagai ego murni yang terpisah dari dunia, sehingga makna pengalaman direduksi menjadi makna bagi ego tersebut.

Proposal yang ditawarkan untuk mengatasi ketidakmampuan fenomenologi dalam menjelaskan praduga-praduga hermeneutis adalah membalikkan teori intuitif kepada teori interpretasi. Fenomenologi harus tunduk kepada kritik hermeneutika. Hermeneutika dalam pemikiran Ricoeur tidak serta merta dipahami sebagai kerangka metodologis yang kaku, melainkan sebuah pertimbangan tentang bagaimana menghubungkan sesuatu yang tertulis atau terkatakan dengan sesuatu yang melampaui sekadar literalisme dalam bahasa teknis. Pencangkokan hermeneutika dan fenomenologi membuka sebuah perspektif baru dalam memahami teks dan fenomena, yakni suatu gerakan ganda dari teks menuju fenomena dan fenomena kembali kepada teks. Dalam kerangka hermeneutika fenomenologi, teks tidak hanya dipahami sebagai ekspresi pengalaman subjektif, tetapi juga sebagai entitas otonom yang memiliki makna tersendiri dan terlepas dari niat pengarang.

Selanjutnya, Ricoeur menegaskan bahwa metode hermeneutika yang dikembangkannya merupakan sebuah jalan melingkar (*detour*) untuk memahami diri dan dunia. Upaya interpretasi membawa penafsir pada lingkaran hermeneutis sehingga setiap tafsiran selalu terbuka kemungkinan-kemungkinan pemaknaan baru. Interpretasi adalah perjalanan yang melelahkan, yang menuntun penafsir untuk keluar dari batas-batas isolasi diri dan berjumpa dengan

kenyataan lain di luar dirinya (Laksana, 2023). Ricoeur mengembangkan konsep “*disclosure of a world*” yaitu teks sebagai sarana penyingkapan dunia melalui interpretasi. Metode penafsiran yang dikembangkannya mensyaratkan setiap penafsir teks untuk menilik lebih dalam melalui pembacaan yang komprehensif sehingga sebuah teks dapat dipahami, baik secara utuh maupun secara parsial. Penafsir harus mendalami bagian-bagian teks untuk memahami konteks keseluruhan, dan memahami teks secara keseluruhan untuk menemukan maknanya secara parsial.

c. Otonomi Teks

Ricoeur mendefinisikan teks sebagai karya wacana/diskursus yang dimantapkan (Kleden, 2020). Teks sebagai fiksasi material dari tindakan atau wacana menorehkan maknanya dalam kata-kata atau kalimat, yang dengan demikian terbebas dari intensionalitas dan maksud pengarang (Furia, 2022). Argumentasi filosofis ini bertolak dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk berbahasa yang memahami diri dan dunianya melalui bahasa. Melalui bahasa, wacana sebagai dialektika antara peristiwa dan makna dapat dipahami. Ricoeur (2021) membuat pembedaan yang tegas antara dimensi semiotik dan dimensi semantik.

Pentingnya bahasa dalam pemikiran Ricoeur merupakan bentuk konfrontasinya terhadap strukturalisme yang secara sempit menempatkan bahasa sebagai sebuah sistem yang tertutup, otonom, dan berisi ketergantungan-ketergantungan internal. Strukturalisme mengabaikan aspek intensionalitas bahasa yaitu bahasa selalu digunakan untuk mengatakan sesuatu tentang sesuatu. Ricoeur menolak asumsi linguistik dalam strukturalisme yang memandang bahwa bahasa merupakan objek yang dapat dikaji secara ilmiah, sebab bahasa bersifat relatif (Ricoeur, 2021).

Ricoeur mengembangkan konsep tentang bahasa secara variatif dalam beberapa pemikirannya tentang diskursus, teks, dan narasi sebagai proyek filosofis untuk menggali komponen-komponen fenomenologis dari ekspresi subjektif dan

makna. Pemikiran tersebut Ricoeur menegaskan argumen tersebut untuk mengkritik fenomenologi Husserl yang menyatakan bahwa kesadaran-kesadaran pra-bahasa tidak mungkin dicapai. Namun, Ricoeur memberikan batasan yang jelas antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam komunikasi lisan, hermeneutika tidak diperlukan karena makna ujaran dapat dirujuk langsung kepada pembicara. Makna dari “apa yang dikatakan” tidak dipisahkan dari proses pengungkapannya. Sedangkan, makna dalam bahasa tulisan tidak lagi terikat kepada penulisnya (Rahman, 2016).

Dalam pembahasannya mengenai teks sebagai bahasa tulisan, Ricoeur berargumen bahwa teks merupakan eksteriorisasi intensional dari dialektika antara peristiwa dan pemaknaan. Ketika diskursus ditransformasikan ke dalam tulisan, ujaran yang semula yang bersifat peristiwa menjadi terfiksasi sehingga dapat melampaui situasi awal kemunculannya. Teks, dengan demikian berfungsi sebagai medium yang mediasi makna melalui ekspresi-ekspresi yang terlembagakan dalam bentuk tulisan, dokumen, maupun monumen yang memiliki karakter serupa dengan tulisan. Mediasi tersebut memungkinkan makna bergerak dari konteks historis asalnya menuju ruang interpretasi yang lebih luas dalam tradisi historis (Ricoeur, 2021). Makna yang terkandung dalam teks tidak lagi sepenuhnya terikat pada maksud pengarang, situasi awal diskursus, maupun audiens asalnya. Melalui distansiasi terhadap teks, interpretasi menjadi mungkin dilakukan secara reflektif.

Ricoeur mengembangkan konsep distansiasi yang berawal dari kritik Habermas atas ide tentang peleburan cakrawala (*fusi of horizon*) Gadamer yang mengharuskan penerimaan teks dalam tradisi secara otoritatif dan melihat diri sendiri dalam kesatuan dengan tradisi yang dibentuk oleh teks (Davidson, 2016). Habermas menolak pandangan tersebut karena konservatisme dalam penerimaan teks secara otoritatif dapat membatasi kritik terhadap tradisi. Ricoeur mereformulasi kritik Habermas dengan menganjurkan sebuah sikap untuk mengambil jarak yang memungkinkan

tindakan interpretasi. Melalui distansiasi, seorang penafsir menunda keterlibatannya dalam dunia sehingga dapat membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang tersedia dalam teks.

d. Dialektika Penjelasan dan Pemahaman

Teori interpretasi yang dikembangkan Ricoeur dalam menganalisis teks melibatkan proses dialogis antara ekplanasi (*erklaren*) dan pemahaman (*verstehen*). Konsep ini merupakan revisi atas pemikiran dikotomis Dilthey antara pemahaman dan eksplanasi. Eksplanasi atau penjelasan adalah penguraian proposisi dan makna objektif sebuah teks, yang sering diaplikasikan pada ilmu alam-empiris sebagai prosedur untuk menguraikan fakta, teori, dan hipotesis. Sebaliknya, pemahaman adalah pembacaan terhadap peristiwa yang diungkapkan dalam wacana, yang diterapkan dalam ilmu-ilmu humaniora yang berkenaan dengan pengalaman subjektif dalam memaknai bentuk-bentuk ekspresi yang sangat luas dan beragam (Ricoeur, 2021). Bertolak dari pemikiran tersebut, interpretasi tidak dianggap sebagai metode alternatif untuk mengeliminasi polaritas antara penjelasan dan pemahaman, melainkan sebagai sebuah proses dialektis yang menyatukan keduanya.

Interpretasi sebuah teks tidak terlepas dari proses dialektis antara penguraian proposisi-proposisi objektif teks dengan pengalaman subjektif penafsir teks. Penafsir teks yang berupaya menyingkapkan selubung makna yang diproduksi dalam sebuah teks selalu bertolak dari analisis-analisis literal, kemudian bergerak menuju pemahaman kontekstual dalam proposisi, dan pada akhirnya tiba pada kesimpulan interpretatif melalui dialog dengan pengalaman subjektifnya. Makna yang dihasilkan oleh penafsiran adalah makna yang selalu membuka sebuah dunia baru, yaitu sebuah dunia yang mungkin, dunia yang terbentang luas di hadapan sebuah teks. Jadi, makna sebuah teks tidak terletak di balik atau di belakang, melainkan terletak di depan teks (Rahman, 2016).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika fenomenologi untuk menyingkap makna mendalam suatu teks melalui proses penafsiran. Pendekatan ini melibatkan dialektika penjelasan dan pemahaman guna menjaga ketelitian ilmiah sekaligus mengakui peran subjektivitas dalam interpretasi (Kublikowski, 2023). Dalam analisis kebijakan, hermeneutika fenomenologi tidak hanya berfokus pada analisis literal teks secara objektif, tetapi juga melibatkan subjek penafsir beserta pengalaman dan horizon pemahamannya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami intensi, nilai-nilai, serta konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi teks kebijakan sekaligus menangkap kompleksitas makna yang tidak dapat dijelaskan secara deskriptif atau teknis semata.

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah dokumen Panduan Pemanfaatan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Teks tersebut dipilih karena merupakan salah satu kebijakan mengenai penggunaan AI dalam ruang lingkup pendidikan tinggi. Proses analisis teks dilakukan melalui studi mendalam terhadap teks yang dimulai dengan membaca teks secara lengkap, membuat koding tematik untuk memetakan topik-topik yang paling dominan dalam teks, dan membuat analisis hermeneutis guna memahami makna yang dikonstruksikan melalui teks. Dalam kerangka hermeneutika fenomenologi Ricoeur, proses penafsiran teks dioperasikan secara metodologis dalam tiga tahap yakni tahap prafigurasi, tahap konfigurasi, dan tahap refigurasi (Hardwick, 2017).

Pertama, tahap prafigurasi. Prafigurasi adalah representasi tindakan yang menggambarkan prapemahaman dalam mengidentifikasi tindakan manusia yang membedakannya dari aktivitas lainnya. Dalam proses penafsiran teks, tahap prafigurasi merupakan tahap awal yang menggambarkan pra-pemahaman dasar dalam memahami sebuah teks. Tahap ini

penafsir teks menguraikan prasangka-prasangka awal yang membentuk pemahaman penafsir terhadap teks. Dalam penafsiran teks kebijakan AI, tahap prafigurasi memainkan peran penting sebagai asumsi dasar yang membimbing peneliti dalam membangun pemikiran struktur kritis untuk menguraikan teks ke dalam bagian-bagian yang mudah ditelaah.

Kedua, tahap konfigurasi. Konfigurasi merupakan tahapan dialogis antara pemahaman awal penafsir dengan dunia teks. Penafsir menguraikan makna teks dengan meneliti struktur teks, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Tahap ini, penafsir mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sebuah teks sehingga pemaknaan terhadap teks menjadi lebih komprehensif. Dalam tahap konfigurasi, peneliti masuk dan berdialog dengan teks melalui pembacaan yang mendalam untuk menemukan struktur narasi yang dibangun dalam teks. Narasi dominan dalam teks diidentifikasi melalui pengulangan proposisi-proposisi tertentu yang ditafsirkan sebagai maksud penulis/pembuat teks untuk menarik perhatian pembaca.

Ketiga, tahap refigurasi. Refigurasi adalah tahap pemaknaan mendalam dan reflektif terhadap teks yang membentuk cara pandang baru dalam diri penafsir. Dalam tahap ini, sebuah teks dimengerti secara baru dan dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Dokumen Panduan Penggunaan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan tinggi diperoleh melalui laman website resmi Kemendiktisaintek. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik pengkodean tematik secara manual. Peneliti membuat tabel tematik, memasukan potongan-potongan teks yang berupa ide-ide pokok dalam setiap bagian teks, menentukan topik, dan melakukan deskripsi fenomenologis. Narasi dominan yang muncul secara eksplisit dalam teks diinterpretasikan sebagai makna yang dikonstruksikan teks tersebut yang selanjutnya dibahas secara

mendalam pada bagian diskusi dan pembahasan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Deskriptif Teks Panduan Pemanfaatan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Kebijakan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan GenAI pada pembelajaran di Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada bulan Oktober 2024. Dokumen tersebut berjudul “Buku Panduan Penggunaan Generatif Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi”. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyikapi fenomena penggunaan generatif AI yang semakin masif dalam aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi. GenAI menawarkan beberapa manfaat praktis antara lain: personalisasi pembelajaran, peningkatan akses pendidikan, pengembangan penilaian yang adaptif, meningkatkan keterlibatan mahasiswa, meningkatkan kolaborasi, dan membantu dosen dalam menjalankan tugas. Namun di sisi lain, pemanfaatan GenAI menimbulkan beberapa persoalan etis yakni: kesenjangan akses, potensi bias dan diskriminasi, potensi plagiarisme, dan ketidakjelasan kepemilikan karya (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024). Bertolak dari kesadaran tersebut, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan sebuah panduan bersama bagi seluruh perguruan tinggi dalam memanfaatkan genAI secara bertanggung jawab dan berpegang pada nilai-nilai etika.

Buku Panduan Penggunaan Generatif AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut teks kebijakan) disusun secara sistematis dalam enam bagian utama. Bagian pertama memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, ruang lingkup, definisi teknologi AI dan tujuan penyusunan kebijakan. Bagian kedua menyajikan pengantar mengenai teknologi GenAI, meliputi prinsip kerjanya, klasifikasi,

peluang pemanfaatan, ragam aplikasi, dan pertimbangan dalam memilih GenAI. Selanjutnya, bagian ketiga membahas tantangan, literasi, serta isu-isu etika yang muncul dalam konteks penggunaan GenAI di lingkungan perguruan tinggi. Bagian keempat menguraikan secara rinci implementasi GenAI dalam aktivitas pembelajaran. Bagian kelima difokuskan pada strategi dan pencegahan penyalahgunaan GenAI, termasuk upaya *reskilling*, mitigasi risiko, dan transformasi proses pembelajaran. Terakhir, bagian keenam memuat kesimpulan dan penutup yang merangkum keseluruhan isi panduan secara komprehensif.

Adapun ruang lingkup dari kebijakan ini adalah para pengguna GenAI dalam lingkungan perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran yakni dosen dan mahasiswa. GenAI didefinisikan sebagai teknologi kecerdasan buatan yang berbasis pada pembelajaran mesin (*machine learning*) yang dioperasikan melalui penggunaan algoritma untuk mempelajari pola atau pengetahuan dari data secara otomatis. Pembelajaran mendalam (*deep learning*), mesin dapat melakukan penalaran untuk merespon input (*prompt*) dari pengguna.

Dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi, teks kebijakan AI secara eksplisit menjabarkan berbagai fungsi dari aplikasi GenAI yang digunakan dalam proses pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pembuatan konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, suara, gambar, dan video. Beberapa aplikasi seperti Gemini, ChatGPT, dan Github Copilot berperan dalam menghasilkan tulisan, kode, atau ide secara otomatis melalui input teks sederhana. Demikian pula dalam hal pembuatan konten suara, teknologi seperti Google text-to-speech, TTS Prosa, dan Podcastle memungkinkan pengguna mengubah teks menjadi suara manusia yang natural. Dalam hal pembuatan konten berbentuk gambar, aplikasi Stable Diffusion dan DALL-E 3 menghadirkan kemampuan menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks. Selain itu, teknologi GenAI dapat digunakan

sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, seperti pencarian konten menggunakan aplikasi *Connected Paper* dan *Open Knowledge Maps*, mengkombinasikan konten dengan menggunakan Revision.AI, dan memahami konten melalui penggunaan *Preplexity AI* dan *Quillbot*.

Uraian deskriptif ini memperlihatkan bahwa dokumen kebijakan penggunaan GenAI dibuat sebagai panduan teknis bagi pengguna AI di perguruan tinggi. Pemilihan diksi atau kosakata yang sarat dengan nuansa normatif berupa petunjuk, anjuran, pedoman, dan arahan memberikan gambaran eksplisit mengenai fungsi regulatif dari dokumen tersebut. Nuansa tersebut semakin diperkuat dengan gaya bahasa dalam teks yang cenderung formal-administratif, di mana sebagian besar teks menggunakan istilah-istilah yang khas dalam bidang teknologi dan pendidikan.

b. Analisis Hermeneutis Teks

Deskripsi tekstual terhadap dokumen kebijakan Pemanfaatan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi membuka ruang penafsiran melalui pendekatan hermeneutika fenomenologi. Bagian ini memaparkan hasil analisis hermeneutis teks kebijakan yang telah diinterpretasikan berdasarkan kerangka konseptual hermeneutika fenomenologi Ricoeur. Topik-topik yang dibahas pada bagian ini merupakan kristalisasi narasi dominan yang muncul dalam dokumen kebijakan tersebut dan diidentifikasi melalui proses pembacaan hermeneutis. Hasil penafsiran menunjukkan bahwa teks kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat regulatif, tetapi juga sebagai upaya untuk menetapkan batas-batas etis dalam adopsi AI sebagai penunjang proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Makna GenAI sebagai Perangkat Pendukung Pembelajaran

Panduan pemanfaatan GenAI dalam pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan regulatif tetapi juga merupakan teks yang membentuk cara pandang sivitas akademika perguruan tinggi terhadap fenomena GenAI. Pemaknaan

sebuah teks perlu melibatkan penilaian kritis baik secara deskriptif (apa yang dinyatakan dalam teks) maupun normatif (apa yang seharusnya dicapai melalui teks) sehingga unsur-unsur yang hadir dalam teks dapat membentuk pemahaman baru. Teks kebijakan dirancang dengan tujuan untuk menetapkan arah strategis dan cakupan sebuah organisasi terkait suatu topik tertentu, sekaligus memberikan justifikasi atas cara suatu hal dilakukan (Weidman & Grossklags, 2020). Kebijakan pemanfaatan GenAI dibuat dengan tujuan untuk menetapkan koridor etis penggunaan AI dalam lingkungan akademik sehingga seluruh masyarakat akademik mampu menyeimbangkan antara kebebasan akademik dan tuntutan etis dalam pemanfaatan teknologi.

Dokumen kebijakan penggunaan GenAI dalam pembelajaran di perguruan tinggi telah menetapkan batas-batas normatif yang memungkinkan para pengguna AI dapat memanfaatkannya secara sadar sebagai alat bantu yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pada bagian latar belakang dokumen disebutkan secara eksplisit bahwa pengembangan GenAI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia, melainkan membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kompleks dan meningkatkan kualitas hidup. Narasi tersebut dipertegas pada beberapa uraian dalam teks yang secara lugas memproposisikan teknologi sebagai alat bantu yang sepenuhnya berada di bawah kendali manusia sebagai pengguna. Penggalan teks yang mencerminkan narasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kutipan 1: *“Pengembangan GenAI bukanlah untuk menggantikan peran manusia, melainkan membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kompleks dan meningkatkan kualitas hidup..”*

Kutipan 2: *“Dalam menggunakan alat bantu ini, mahasiswa menempatkan GenAI sebagai alat bantu awal, yang hasil akhirnya perlu difinalisasi oleh mahasiswa”*

Narasi tersebut tidak hanya dimaknai secara literal sebagai sebuah imperatif etis untuk menggunakan GenAI dalam batas tertentu sebagai alat bantu, tetapi

menyiratkan makna filosofis tentang eksistensi teknologi dalam kehidupan manusia. Teknologi, termasuk GenAI, sebagaimana ditegaskan oleh Heidegger, hanya merupakan *entframing* yang membingkai cara berpikir manusia. Artinya, GenAI harus dipahami secara epistemologis yakni sebagai objek atau sarana, bukan sebagai subjek. Teknologi tidak serta merta menggeser peran akal budi yang bebas dan otonom dan menggantikannya dengan algoritma mesin yang bekerja secara mekanis. Walaupun dapat beroperasi secara mandiri, GenAI tidak bisa dikategorikan sebagai agen mandiri tetapi sebagai agen artifisial yang beroperasi secara programatik di bawah kendali algoritma yang ditanam oleh perancangannya. GenAI, seperti ChatGPT, tidak memiliki kapasitas untuk berpikir, bernalar, dan memahami, melainkan bekerja dalam struktur formal sesuai dengan pasokan data yang diolahnya untuk menghasilkan sebuah teks (Floridi, 2023). Argumen ini menyiratkan bahwa ketidakmampuan GenAI dalam membangun penalaran secara semantis dapat berimplikasi pada kerentanan teknologi itu sendiri, yakni potensi menghasilkan informasi yang tidak mengandung kebenaran.

Penggunaan GenAI dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi menimbulkan kecemasan mengenai ancaman terhadap aspek orisinalitas karya mahasiswa, di mana ketergantungan terhadap GenAI dapat merusak kemampuan berpikir dan bernalar secara kritis, yang pada gilirannya bahkan dapat meningkatkan praktik plagiarisme (Gupta & Nyamapfene, 2025). Ketergantungan sepenuhnya pada GenAI berimplikasi negatif pada kemampuan kognitif, di mana dalam tugas-tugas pembelajaran, mahasiswa memiliki kecenderungan untuk menggantikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan kerja-kerja mekanis teknologi AI.

Keutamaan Etika dan Kejujuran Akademik

Imperatif etis yang dibangun oleh kebijakan pemanfaatan GenAI secara eksplisit mengarahkan para dosen dan

mahasiswa untuk menggunakan perangkat lunak GenAI secara kritis dan bertanggung jawab, yaitu dengan menghindari plagiarisme dan memanipulasi data. Beberapa bagian dalam teks secara jelas menyebutkan kecenderungan para pengguna untuk mempercayai seluruh hasil atau keluaran yang diproduksi oleh teknologi GenAI yang pada akhirnya dapat menciptakan ketergantungan pada teknologi tersebut. Problematika ini mencerminkan ketiadaan sikap kritis pada para pengguna teknologi yang pada gilirannya justru memunculkan berbagai problem etis dalam penggunaannya.

Dalam perspektif fenomenologi, penekanan pada intensionalitas kesadaran dapat membawa implikasi etis bagi para pengguna GenAI untuk selalu menyadari bahwa pemanfaatan teknologi harus mengarahkan para pengguna kepada sesuatu yang bermakna. Kesadaran ini dapat dicapai apabila setiap pengguna GenAI mampu menyertakan kesadaran reflektif dalam setiap tindakannya. Teks panduan kebijakan meresonansi kesadaran tersebut dalam beberapa narasi sebagai berikut:

Kutipan 1: *“pemanfaatan teknologi dalam pengerjaan tugas akademik tidak dapat lagi dihindari. Dosen perlu mendorong cara berpikir kritis dan etis melalui umpan balik atau kritik yang bersifat evaluatif...”*

Kutipan 2: *“GenAI hanya perangkat bantu yang diciptakan manusia. Apa yang dimasukkan akan menentukan apa yang didapatkan...”*

Kutipan 3: *“Dalam hal pemanfaatan AI di perguruan tinggi, EU AI Act mengkategorikan GenAI sebagai kelompok teknologi berisiko tinggi...”*

Penegasan terhadap bahaya dan risiko teknologi terhadap kehidupan manusia telah dikemukakan oleh Heidegger dalam kritiknya terhadap teknologi modern. Heidegger menegaskan tentang pentingnya aktivitas berpikir, baik pemikiran kalkulatif-teknologis maupun pemikiran meditatif, sebagai sebuah sikap dasar yang mampu menghindarkan kita dari sikap fatalistik terhadap teknologi (Huttunen & Kakkori, 2022). Pemikiran kritis dapat menjadi

jembatan yang menghubungkan antara ketidakberdayaan manusia untuk menghindari dampak destruktif teknologi dengan kapasitas moral dalam diri manusia untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana atau objek yang tetap memuliakan manusia sebagai subjek.

Senada dengan argumen tersebut, Ricoeur dalam buku *One Self as Another* mengajukan konsep tentang *little ethics* sebagai cita-cita akan hidup baik, dengan dan untuk yang lain dalam institusi-institusi yang adil (Baghi, 2021). Dalam konteks ini, *little ethics* dapat dimaknai oleh seluruh masyarakat perguruan tinggi sebagai sebuah kewajiban etis untuk menggunakan GenAI dalam cita-cita akan hidup baik, yang menghargai kejujuran akademik, dan membangun institusi pendidikan yang adil bagi seluruh sivitas akademika. Setiap penggunaan teknologi, termasuk penggunaan GenAI, harus diarahkan pada pemenuhan nilai-nilai etika, yang berorientasi pada keadilan, dan membangun kesadaran para pengguna akan pentingnya sikap kejujuran. Kebijakan AI yang diterapkan di perguruan tinggi dapat dimaknai sebagai pedoman etis yang membimbing dan mengarahkan para sivitas akademika dalam menggunakan GenAI secara bertanggung jawab.

Sebuah institusi pendidikan tinggi, dengan demikian, tidak hanya berperan sebagai pusat diseminasi pengetahuan, melainkan juga merupakan lembaga formasi yang membentuk mahasiswa dengan penanaman nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Pentingnya aspek etika dan kejujuran harus tercermin dalam seluruh aktivitas pembelajaran yang menunjang pencapaian mutu akademik sambil tetap berpedoman pada penerapan nilai-nilai etika dan kejujuran akademis.

Ketegangan antara Regulasi dan Otonomi Institusi Akademik

Meskipun panduan yang diterbitkan pemerintah bersifat tidak mengikat, terdapat ketegangan implisit antara upaya standarisasi dan penghormatan terhadap otonomi institusi. Dalam beberapa bagian disebutkan

secara jelas bahwa setiap perguruan tinggi diberi kebebasan untuk merumuskan sendiri kebijakan pemanfaatan teknologi AI sesuai dengan konteks dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Narasi yang mencerminkan ketegangan tersebut antara lain:

Kutipan 1: “*perguruan tinggi perlu memastikan penggunaan GenAI secara etis dan bertanggung jawab. Untuk menjamin hal itu, masing-masing perguruan tinggi perlu menentukan kebijakan sendiri tentang pemanfaatan GenAI dalam pembelajaran, sebagai salah satu kebijakan akademik di perguruan tinggi*”

Dialektika antara sentralisasi kebijakan pemerintah dan otonomi perguruan tinggi dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peran negara sebagai institusi yang adil dengan otonomi perguruan tinggi yang menjunjung tinggi kebebasan akademik. Keseimbangan terjadi manakala teks kebijakan mengenai pemanfaatan AI membuka ruang diskursif terhadap pemaknaan baru oleh masing-masing perguruan tinggi untuk menerjemahkan kebijakan tersebut secara kontekstual sesuai kebutuhan pada masing-masing institusi perguruan tinggi.

Konsep tentang otonomi selalu dipahami dalam keterkaitannya dengan hukum atau aturan, baik yang ditetapkan oleh pihak lain maupun oleh subjek itu sendiri (Wermke & Salokangas, 2015). Secara lebih spesifik, otonomi institusi akademik disebut sebagai absennya kontrol otoritas terhadap aktivitas pendidikan. Dalam konteks kebijakan AI, otonomi institusi pendidikan tinggi harus dimaknai sebagai kebebasan akademik yang dimiliki perguruan tinggi untuk mengembangkan pola pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai etika.

Ketegangan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis teknologi tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosial masing-masing institusi, yang mana hal ini sejalan dengan prinsip hermeneutika bahwa makna selalu bersifat

kontekstual dan terbuka untuk interpretasi. Dalam konteks tersebut, tendensi otoritatif pembuat kebijakan dijumpai melalui ketersediaan ruang-ruang kebebasan dalam menyusun panduan praktis pada masing-masing perguruan tinggi. Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dipersepsikan sebagai panduan yang memayungi seluruh kebijakan implementatif yang diterapkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dialog Intersubjektif Dosen, Mahasiswa, dan Teknologi

Kehadiran teknologi GenAI telah merekonstruksi relasi intersubjektif antara dosen dan mahasiswa di ruang akademik. Ketimpangan relasi antara dosen dan mahasiswa yang cenderung hirarkis sering menimbulkan asumsi bahwa dosen adalah pemilik otoritas yang berperan mentransmisikan pengetahuan kepada mahasiswa sebagai penerima yang pasif (Patty et al., 2024). Pola relasi ini membawa implikasi pada hubungan yang asimetris antara dosen dan mahasiswa. Tren digitalisasi dan teknologi AI telah mendisrupsi relasi tersebut, di mana para mahasiswa yang sebagian besar merupakan *digital-native* yang sangat adaptif terhadap teknologi memiliki akses yang luas dan tak terbatas pada sumber-sumber pengetahuan. Klaim bahwa dosen merupakan subjek otoritatif pengetahuan dipatahkan dengan kehadiran teknologi AI.

Dokumen kebijakan ini secara implisit mereformulasi konsep hubungan dosen dan mahasiswa. Dosen tidak hanya berperan sebagai penilai hasil karya mahasiswa tetapi juga sebagai mitra dalam memproduksi konten-konten pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dosen menjadi mitra dialog dalam sebuah komunikasi yang interaktif sekaligus menunjang kerja-kerja kolaboratif. Relasi simetris antara dosen dan mahasiswa dimanifestasikan dalam langkah-langkah praktis seperti kemampuan bernegosiasi, kolaborasi, dan eksperimen bersama untuk menghasilkan pengetahuan baru.

Makna yang dikonstruksikan dalam kebijakan telah membawa kesadaran baru

mengenai eksistensi teknologi dalam dunia pendidikan. Teknologi AI tidak hanya dipahami sebagai suatu entitas yang hadir secara faktual melainkan bermakna sebagai “ada”, yakni sebuah pengungkapan diri yang disertai dengan pengalaman, makna, dan cara bagaimana sesuatu berada dalam dunia. Pengalaman sivitas akademika dalam penggunaan teknologi AI tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi elemen-elemen sosial, seperti interaksi sosial dan norma-norma kelembagaan (Simatupang et al., 2025). Kebijakan penggunaan AI dalam pembelajaran di perguruan tinggi perlu mendefinisikan kembali dialog intersubjektif antara dosen dan mahasiswa dalam relasi edukatif yang didasarkan pada pengakuan (*recognition*) setiap pribadi sebagai subjek. Peran dosen sebagai pembimbing moral bagi mahasiswa tidak tergantikan oleh AI.

c. Implikasi Pada Praktek Penggunaan AI di Perguruan Tinggi AI Sebagai Tindakan Simbolik

Ricoeur mengembangkan model penafsiran teks ke dalam konteks tindakan bermakna. Menurut Ricoeur, setiap tindakan manusia menyiratkan tuntutan untuk pengakuan, yang menuntut pihak lain untuk memberikan makna terhadap tindakan tersebut (Fanizzi, 2025). Sebagaimana sebuah teks, tindakan merupakan sebuah proses penyingkapan makna yang pada gilirannya membentuk identitas sekaligus menyingkap identitas pelakunya. Ketika tindakan telah selesai, ia akan melepaskan diri dari pelakunya sehingga meninggalkan jejak yang terinskripsi, yang kemudian menjadi dokumen bagi tindakan manusia (Kublikowski, 2023). Setiap ekspresi simbolik yang mengatakan arti tentang sesuatu dapat bermakna ganda, sehingga melalui penafsiran, setiap tindakan dapat dimaknai.

Penggunaan GenAI dalam pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan teknis semata melainkan sebagai tindakan yang memiliki makna simbolis dan etis. Tindakan penggunaan AI pada pembelajaran di perguruan tinggi tidak

dapat dianggap sebagai tindakan netral. Sebaliknya, ia merupakan tindakan simbolik yang membawa makna tertentu. Sebagai contoh, seorang dosen yang menggunakan AI dalam menyusun silabus perkuliahan, atau seorang mahasiswa yang menggunakan AI dalam menyusun tugas perkuliahan, tindakan tersebut menyingkapkan makna di mana AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran melainkan juga sebagai mediasi simbolik dalam konstruksi makna pendidikan.

Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan AI dalam pembelajaran di perguruan tinggi dapat menjadi simbol dominasi teknologi digital dalam dunia pendidikan. Teknologi digital telah menanamkan pengaruh yang sangat kuat dalam institusi pendidikan yang memicu potensi destruktif terhadap nilai-nilai tradisional seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kebebasan.

Penafsiran sebagai Inti Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran bukanlah sekadar kegiatan menyerap informasi, melainkan merupakan sebuah proses interpretatif yang melibatkan distansiasi dan apropriasi. Distansiasi berarti menjaga jarak kritis terhadap teks. Penggunaan informasi yang dihasilkan oleh GenAI, setiap pengguna perlu menyadari bahwa teks yang dihasilkan oleh AI bukan sebuah kebenaran tunggal yang bisa diterima secara pasif. Sebaliknya, setiap pengguna teknologi AI perlu melibatkan daya refleksi interpretatif untuk memahami makna dari teks hasil keluaran AI, yakni membiarkan dirinya bergumul dengan dunia teks. Memahami teks bukanlah sebuah akhir dalam dirinya sendiri. Dalam refleksi hermeneutis, pembentukan diri setara dengan pembentukan makna (Ricoeur, 2021). Artinya, pemahaman terhadap teks adalah kontinuitas pembelajaran, yang ditempuh melalui jalan panjang dan melingkar untuk mencapai pemaknaan yang hakiki.

Selanjutnya, apropriasi berarti membawa makna yang ditawarkan teks ke dalam horizon eksistensial pembaca. Melalui

apropriasi, terjadilah transformasi informasi menjadi pemahaman yang dipersonalisasikan. Pembelajaran menggunakan AI, setiap pengguna adalah subjek yang membentuk makna melalui peleburan antara pra-pemahaman mereka dengan horizon baru yang dihasilkan oleh teks yang diproduksi AI.

Pembelajaran di perguruan tinggi mesti dirancang sebagai ruang hermeneutik, bukan sekadar ruang transfer informasi. Setiap aktivitas pembelajaran harus memberi ruang yang lebih luas bagi praktik interpretatif. Secara aplikatif, mahasiswa perlu melibatkan kemampuan berpikir kritis, komparatif, dan bahkan filosofis dalam pengerjaan tugas-tugas perkuliahan, sehingga pada akhirnya mahasiswa menjadi pembelajar atau penafsir yang aktif dan tidak terjebak pada penerimaan yang pasif terhadap informasi yang dihasilkan oleh GenAI.

Transformasi Subjek

Pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya dimaknai sebagai proses investasi pengetahuan melainkan terarah kepada pembentukan subjek yang memiliki kesanggupan (kapabilitas) dan tanggung jawab. Ricoeur mengartikan kapabilitas sebagai kemampuan untuk menyebabkan sesuatu terjadi, di mana melalui kemampuan itu orang mengakui dirinya dan mengidentifikasi dirinya sebagai agen suatu perbuatan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya (Baghi, 2021). Pembelajaran di perguruan tinggi harus mengarah pada pembentukan subjek yang memiliki kesanggupan untuk bertindak etis dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Fenomena penggunaan AI dalam pembelajaran di perguruan tinggi perlu direfleksikan dalam konteks penggunaannya sebagai alat bantu dan mitra belajar, sehingga pengguna AI tetap menjadi subjek etis yang bertanggung jawab atas *output* yang dihasilkan AI. Kebijakan penggunaan AI perlu dipadatkan sebagai panduan etis yang mampu mentransformasi pengguna AI dari sekadar sebagai pengguna pasif menjadi subjek aktif yang memiliki kesanggupan

reflektif untuk menilai setiap luaran hasil AI serta memiliki kesanggupan untuk bertanggung jawab atas hasil tersebut. Sebagaimana Ricoeur menyebut bahwa subjek adalah *a genuine author of his act*, maka setiap pengguna AI mesti memiliki kesanggupan untuk bertindak sekaligus menyadari dimensi tanggung jawab yang melekat pada hasil dari tindakannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis hermeneutis terhadap teks Panduan Pemanfaatan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai pedoman teknis, melainkan juga sebagai wacana yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan horizon nilai sivitas akademika terhadap teknologi kecerdasan buatan. Meskipun secara normatif dokumen kebijakan menekankan tanggung jawab etis pada aspek penggunaan yang tepat, penghindaran plagiarisme, penguatan orisinalitas, dalam kerangka hermeneutika Paul Ricoeur tanggung jawab etis tersebut belum sepenuhnya menyentuh dimensi eksistensial, yakni kesadaran etis “hidup baik dengan dan untuk yang lain”. Melalui proses distansiasi, teks kebijakan dibaca sebagai wacana yang otonom dari intensi penyusunnya; sementara dialektika penjelasan-pemahaman memungkinkan pengungkapan lapisan makna normatif yang tersembunyi di balik formulasi regulatif. Tahap apropriasi, makna tersebut diproyeksikan kembali ke dalam horizon pengalaman sivitas akademika sebagai subjek etis. Studi hermeneutis ini menawarkan perspektif baru dalam memahami teks kebijakan bukan hanya sebagai perangkat regulatif, melainkan juga sebagai wacana pembentuk makna yang mendorong transformasi diri sivitas akademika menjadi subjek etis yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azevedo, L., Mallinson, D. J., Wang, J., Robles, P., & Best, E. (2024). AI policies, equity, and morality and the implications for faculty in higher education. *Public Integrity*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10999922.2024.2414957>
- Baghi, F. (2021). Filsafat kapabilitas dan kemungkinan politik pengakuan yang mutual (Merekonstruksi filsafat praktis Paul Ricoeur). *Jurnal Ledalero*, 20(1), 51–65. <https://doi.org/10.31385/jl.v20i1.229.51-65>
- Bagirzade, M. , Analysing public policy in terms of political theory: The case of information policy (July 04, 2024). The Turkish version of the article was published as a conference text in 2021. But the English version has not been printed anywhere and has not been presented anywhere., SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4884924>
- Cicchetti, C. C. (2024). AI in higher education: Does not help, might hurt. *Journal of Education for Business*, 99(7–8), 438–443. <https://doi.org/10.1080/08832323.2024.2432936>
- Fanizzi, C. (2025). The symbolic precariousness of the teaching profession: From narrative impoverishment to the production of sentences. *Pro-Posições*, 36. <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2024-0043en>
- Fatmadiwi, A., & Hartoyo, A. (2025). Kebijakan artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran di perguruan tinggi. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 284–291. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3633>
- Floridi, L. (2023). AI as agency without intelligence: On chatGPT, large language models, and other generative models. *Philosophy and Technology*, 36(1), 1-7. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00621-y>
- Furia, P. (2022). Understanding and explanation. Paul Ricœur and human geography. *Continental Philosophy Review*, 55(2), 193–214. <https://doi.org/10.1007/s11007-021-09554-9>
- Gupta, V., & Nyamapfene, A. (2025). Generative AI in universities: Practices at UCL and other institutions, and the path forward. *Internet Reference Services Quarterly*, 29(1), 131–151. <https://doi.org/10.1080/10875301.2025.2453461>
- Harari, Y. N. (2024). *Nexus, a brief history of information networks from the stone age to AI*. Random House.
- Hardwick, L. (2017). Paul Ricoeur’s theory of interpretation adapted as a method for narrative analysis to capture the existential realities expressed in stories from people living with Multiple Sclerosis. *Qualitative Social Work*, 16(5), 649–663. <https://doi.org/10.1177/1473325016638423>
- Huttunen, R., & Kakkori, L. (2022). Heidegger’s critique of the technology and the educational ecological imperative. *Educational Philosophy and Theory*, 54(5), 630–642. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1903436>
- Ivanov, S. (2023). The dark side of artificial intelligence in higher education. *Service Industries Journal*, 43(15–16), 1055–1082. <https://doi.org/10.1080/02642069.2023.2258799>
- Jaelani, Hidayat, E. N., & Febryantahanuji. (2024). Dampak penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk manajemen kurikulum pendidikan tinggi di Jawa Tengah. *Ilmsiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 339–352.
- Jafar, M., Asfar, A. M. I. T., & Asfar, A. M. I. A. (2024). Artificial intelligence dalam pendidikan dan penelitian: tantangan dan solusi menghadapinya. *Simposium Nasional Kepemimpinan Perguruan*

- Tinggi Indonesia*, 1(2017), 1–9.
<https://proceeding.unnes.ac.id/snkpti/article/view/3900>
- Kleden, L. (2020). Wahyu alkitabiah dalam tinjauan hermeneutika Ricoeur. *Jurnal Ledalero*, 19(2), 169.
<https://doi.org/10.31385/jl.v19i2.213.169-184>
- Kublikowski, I. (2023). Reflections on analysis in qualitative research: The Hermeneutic Circle in Ricoeur. *Paideia*, 33. <https://doi.org/10.1590/1982-4327e3319>
- Laksana, A. B. (2023). *Jalan melingkar: menafsir politik, etika, dan agama bersama Paul Ricoeur (1913-2005)*. PT Kanisius.
- Liang, E. S., & Bai, S. (2024). Generative AI and the future of connectivist learning in higher education. *Journal of Asian Public Policy*, 00(00), 1–23.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2024.2386085>
- Luo, J. (2024). A critical review of GenAI policies in higher education assessment: A call to reconsider the “originality” of students’ work. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 49(5), 651–664.
<https://doi.org/10.1080/02602938.2024.2309963>
- Malik, A., Khan, M. L., Hussain, K., Qadir, J., & Tarhini, A. (2024). AI in higher education: unveiling academicians’ perspectives on teaching, research, and ethics in the age of ChatGPT. *Interactive Learning Environments*, 1–17.
<https://doi.org/10.1080/10494820.2024.2409407>
- Mezei, B. M. (2022). The sovereignty of revelation: on Paul Ricoeur’s hermeneutics of revelation. *Studies in Religion-Sciences Religieuses*, 51(2), 314–333.
<https://doi.org/10.1177/00084298211044814>
- Munandar, H., Ade Kurnia Harahap, M., Haryanto, H., & Lisma Lestari, V. (2023). Pemanfaatan teknologi artificial intelligences (AI) bagi dosen dalam menghadapi tantangan perguruan tinggi pada era disrupsi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 10566–10576.
- O’Dea, X. (2024). Generative AI: Is it a paradigm shift for higher education? *Studies in Higher Education*, 49(5), 811–816.
<https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2332944>
- Patty, J., Lekatompessy, F. M., & Lekatompessy, J. (2024). Dinamika hubungan kekuasaan antara dosen pembimbing dan mahasiswa dalam konteks feodalisme akademik. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 6673–6695.
<https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2058>
- Pembelajaran, D., (2024). *Panduan penggunaan generative artificial intelligence (GenAI)*. Kemendikbudristek.
https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/wp-content/uploads/2024/11/Buku-Panduan_-Penggunaan-Generative-AI-pada-Pembelajaran-di-Perguruan-Tinggi-cetak.pdf
- Rahman, D. R. (2016). Kritik nalar hermeneutika Paul Ricoeur. *KALIMAH*, 14(1), 37–52.
<https://doi.org/10.21111/klm.v14i1.360>
- Ricoeur, P. (2021). *Hermeneutika dan ilmu-ilmu humaniora*. IRCISO D.
- Simatupang, E. C. M., Ismail, I., Waluyo, B., & Panmei, B. (2025). ChatGPT in education: The influence of institutional support and peer dynamics in Indonesian higher education. *Internet Reference Services Quarterly*, 0(0), 1–20.
<https://doi.org/10.1080/10875301.2025.2461476>
- Simoný, C., Specht, K., Andersen, I. C., Johansen, K. K., Nielsen, C., & Agerskov, H. (2018). A Ricoeur-inspired approach to interpret participant observations and interviews. *Global Qualitative Nursing Research*, 5. <https://doi.org/10.1177/2333393618807395>
- Subiyantoro, H., Hartono, R., Fitriati, S. W., & Faridi, A. (2023). Dampak kecerdasan

- buatan (AI) terhadap pengajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi: Tantangan dan peluang. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 6(1), 346–349. <http://pps.unnes.ac.id/pps2/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes>
- Watson, S. W. (2022). Hermeneutic phenomenology: Interpretation of lived experience. In S. Watson, S. Austin, & J. Bell (Eds.), *Conceptual Analyses of Curriculum Inquiry Methodologies* (pp. 204-222). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8848-2.ch010>
- Weidman, J., & Grossklags, J. (2020). Assessing the current state of information security policies in academic organizations. *Information and Computer Security*, 28(3), 423–444. <https://doi.org/10.1108/ICS-12-2018-0142>
- Wermke, W., & Salokangas, M. (2015). (Editorial) Autonomy in education: theoretical and empirical approaches to a contested concept. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*. <https://doi.org/10.3402/nstep.v1.28841>
- White, T., Woodward, B., Graham, D. V., Milner, H. R., & Howard, T. C. (2020). Education policy and black teachers: perspectives on race, policy, and teacher diversity. *Journal of Teacher Education*, 71(4), 449–463. <https://doi.org/10.1177/0022487119879895>